

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEGAWASAN
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura)**

Andarias Patiran *)

Melyanus Bonsapia *)

Abstract

This study conducts budget planning, budget competence and oversight of budget absorption through the moderating variable organization in the Jayapura district government. Examiners were carried out on a sample of 89 respondents. The sample method used was purposive sampling. Data is done by direct survey. Hypothesis testing is tested empirically using moderated regression.

The results showed that budget planning had no effect on the regency budget of jayapura, human resource competence had an effect on budget absorption of the regency of jayapura, budget execution had no effect on the regency budget of jayapura, supervision had an effect on the budget of the regency of jayapura, organizational commitment did not moderate budget planning on budget provision the regency of jayapura, the organizational commitment to moderate the competence of human resources towards the absorption of the jayapura regency budget, the organizational commitment to moderate the implementation of the jayapura district budget and the organizational commitment did not moderate the supervision of the budget absorption of the jayapura regency.

Keywords: *Budget planning, human resource competence, budget execution, supervision, organizational commitment and budget absorption.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Setiap organisasi baik perusahaan maupun instansi atau lembaga sektor publik dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan perencanaan. Perencanaan akan tercermin dari anggaran yang telah dirancang suatu organisasi, baik organisasi swasta atau *sector* publik.

Menurut Mardiasmo, (2012) anggaran sektor publik adalah suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu *indicator* penting untuk mengetahui kinerja APBN/APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

*) *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua*

Permasalahan mengenai realisasi daya serap anggaran yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh banyak Instansi atau Lembaga Pemerintahan tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah-daerah di Indonesia. Menurut Siswanto, (2011) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, belanja Kementerian/Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pola demikian terjadi di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga akan mengganggu rencana kebijakan APBN/APBD yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga telah banyak dilakukan akan tetapi belum memberikan dampak yang signifikan. Permasalahan seperti ini dialami juga oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Provinsi Papua

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dimana penyerapan anggaran setiap OPD dalam semester I triwulan II masih sangat minim sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura berharap secepatnya dimaksimalkan. Penyerapan anggaran di setiap OPD biasanya terjadi secara optimal pada triwulan III dan IV karena pengerjaannya sudah harus diselesaikan mengingat akan berakhir tahun anggaran. Sedang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran di Kabupaten Jayapura cukup besar karena alokasi anggaran yang harus dikerjakan tidak maksimal selama tahun anggaran berjalan. SILPA itu dapat terjadi karena adanya tiga indikator yakni perencanaan yang tidak terukur dengan baik, rendahnya penyerapan anggaran, ketiga realisasi pendapatan anggaran lebih besar dari target. Juga penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan karena petunjuk teknis (Juknis) yang seharusnya cepat, malah turunya terlambat sehingga OPD belum dapat melakukan kegiatan. <https://jayapurakab.go.id/penyerapan-anggaran-triwulan-ii-rendah/>.

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya Mardiasmo, (2012). jika dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tidak

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, maka akan terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah Perencanaan anggaran, menurut Zarinah, (2015) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Putri, (2017) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil temuan ini didukung dengan hasil kajian Purba, 2017 yang menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian Putri, (2017) dan Pancawati, (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Faktor Kedua yang mampu mempengaruhi penyerapan anggaran adalah kompetensi sumber daya manusia, Di dalam organisasi sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi Sutrisno, (2011). Pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian Iqbal, (2018) dan Putri, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian Iqbal, (2018) dan Putri, (2017) bertolak belakang dengan penelitian Pancawati, (2015), dimana hasil penelitian menemukan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Faktor ketiga adalah variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan penyerapan anggaran terhadap komitmen organisasi, Komitmen organisasi dapat tercipta jika organisasi memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya. Hal ini berarti, jika organisasi peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Dewi, (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran pada penyerapan anggaran Pemerintah. Namun penelitian Dewi, (2017) bertolak belakang dengan penelitian Iqbal, (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran pada penyerapan anggaran Pemerintah.

Yang menjadi *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini adalah dimana peneliti menambahkan dua variable yaitu pelaksanaan anggaran dan pengawasan. Peneliti menambahkan kedua variable tersebut dengan pertimbangan dari penelitian terdahulu dimana saran dari penelitian terdahulu untuk memasukan kedua variable tersebut pada penelitian akan datang. Sehingga peneliti mencoba menambahkan kedua variable tersebut sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 2) Apakah kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 3) Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 4) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 5) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 6) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 7) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
- 8) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?

Telaah Pustaka

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh

DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Purba, (2017)

Hingga saat ini salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah besarnya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya Mardiasmo, (2012) Pelaksanaan kegiatan merupakan pelaksanaan dari program yang dijabarkan dalam kegiatan di setiap SKPD yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan melalui penatausahaan keuangan. Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kompetensi Sumber daya Manusia

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa setiap organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya.

Di dalam organisasi sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi. Menurut Sutrisno, (2011) sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kemampuan, keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka akan semakin baik kinerja organisasi tersebut. Sumber daya manusia pada prinsipnya merupakan satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, sebuah organisasi yang memiliki tujuan yang bagus serta sarana dan prasarana yang canggih akan sulit mencapainya Harsono, (2011).

Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi Feriyanto, (2015). Kemampuan mendefinisikan tujuan dan membuat strategi atau langkah yang akan dilakukan organisasi

akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, menyatakan bahwa perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan akan menghasilkan rencana. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan rencana yang telah dibuat dilakukanlah penyusunan anggaran yang merupakan proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu.

Hasil dari penyusunan atau perencanaan anggaran adalah anggaran yaitu rencana yang diungkapkan secara kuantitatif biasanya dalam unit moneter, meliputi periode waktu tertentu, biasanya satu tahun Halim, (2009). Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai pemerintah sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang telah disetujui oleh pihak legislatif untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran Mardiasmo, (2012)

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robbins, (2015) bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai bagaimana tingkat seorang anggota mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan tujuan organisasi, serta harapan anggota organisasi untuk bertahan dalam organisasi. komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasional teridentifikasi dalam tiga komponen yaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan. Pada dasarnya anggota organisasi itu ingin berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi dimana untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh sifat komitmen yang berbeda-beda Meyer, (1991)

Menurut teori goal-setting, pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari

pada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan berimplikasi pada pencapaian serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Kepala SKPD harus menyerahkan DPA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan penyusunan RKA-SKPD tersebut diterima oleh setiap SKPD. Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Selanjutnya berdasarkan rancangan DPA-SKPD Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.

Pengawasan

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam seminar *Indische Compslahiliteitwet* (ICW) Abdllah, (2017)

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 (6) menyebut bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

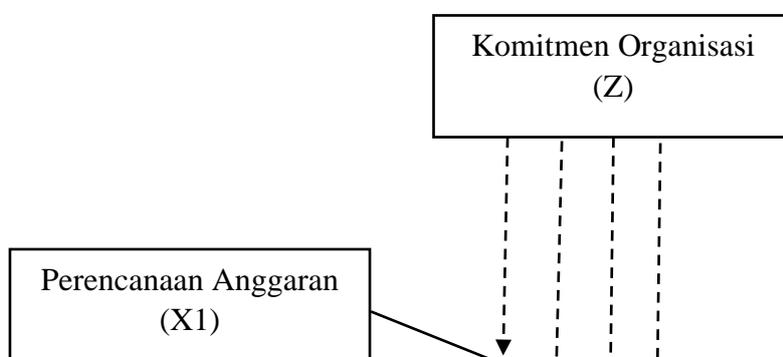
Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka pemikiran



Hipotesis

- H1 : Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H2 : Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H3 : Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H4 : Pengaruh pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H5 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H6 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sdm terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H7 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
- H8 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengawasan anggaran terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, lokasi penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria tertentu, yang ditentukan peneliti. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan, Noch, (2015) Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni sebanyak 34 OPD yang ada di Kabupaten Jayapura

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Noch, (2015). Dalam penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasinya. Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan teknik penarikan *non probabilitas* dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *porposive sampling*. Adapun kriteria yang ditentukan adalah: Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian keuangan

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka sampel dalam penelitian ini adalah diambil dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 3 responden yaitu Pegawai yang menduduki jabatan Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan kepala sub bagian keuangan. sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah (3 responden x 34 OPD) sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 responden

Uji Instrumen Penelitian

Ketepatan pengujian hipotesis tentang hubungan variable sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Pengujian hipotesis tidak akan memenuhi sarannya, bilamana data yang dipakai adalah data yang tidak reliable dan tidak valid/tepat. Oleh karena itu sebelum data diolah lebih lanjut sebaiknya diuji reliabilitas dan validitasnya.

Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud Arikunto, (2003) Validitas menunjukkan sejauhmana alat pengukur untuk mengukur apa yang diukur Singarimbun, (2006) Sedangkan menurut Sugiyono, (2014). hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menghasilkan ukuran pernyataan yang konsisten. Menurut Sugiyono, (2014) reliabilitas adalah derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS 23.00 uji statistik *Cronbach Alpha based on standardized items*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha based on standardized items* > 0,6. Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa konstruk variabel memberikan nilai *Cronbach Alpha based on standardized items* > 0.70 yang menurut Ghozali, (2018) bisa dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Sekaran, (2008) untuk dapat melakukan analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi analisis, yaitu: normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Agar data yang terkumpul dapat bermakna dan bermamfaat, sehingga menghasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji Normalitas

Tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal Chandrarin, (2017)

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Menurut Chandrarin, (2017) metode yang digunakan untuk menguji normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan asumsi *Heteroskedastisitas* adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*. Jika

varians berbeda, disebut *heteroskedastisitas*. Menurut Chandrarin, (2017) model regresi yang baik adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Model regresi yang bebas *heteroskedastisitas* dapat dilihat melalui *charts scatterplot*. Menurut Hartono, (2008) dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi *heterokedastisitas*.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heterokedastistas*.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

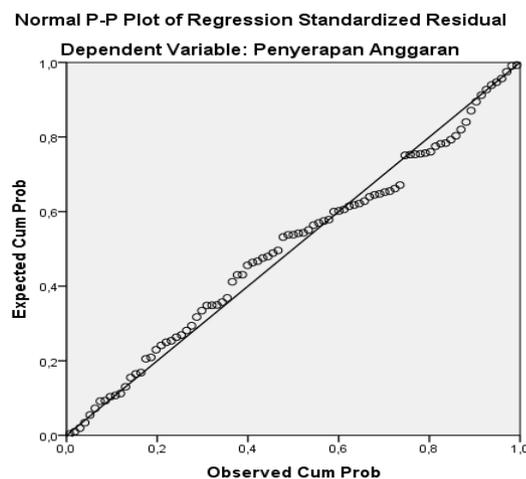
Cara mendeteksi ada tidaknya gejala *multikolinieritas* adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi *multikolinieritas*, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi *multikolinieritas*. Chandrarin, (2017)

Pembahasan

Uji Normalitas

Pengujian normal tidaknya distribusi data penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probabilityplot*. Tampilan hasil pengujian *normal probabilityplot* data penelitian ini terlihat dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Data

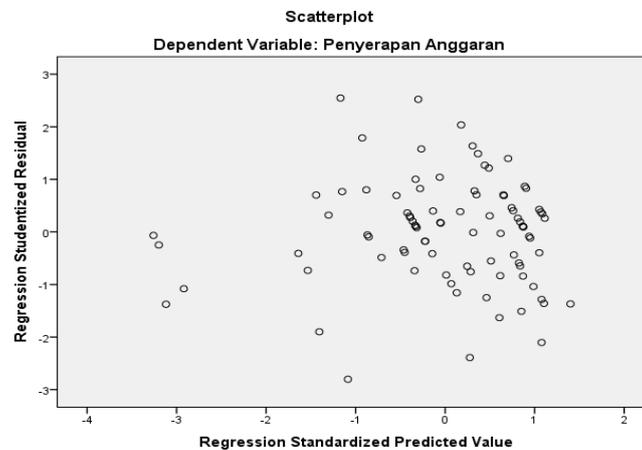


Berdasarkan normal *probabilityplot* di atas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaidah normalitas karena terlihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, penyebarannya secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada gambar *charts scatterplot* dibawah ini.

Gambar 3. Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Gambar di atas menunjukkan bahwa data penelitian bebas heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas kajian ini menggunakan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Pengujian multikolinieritas seperti yang terlihat di bawah ini;

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics
	VIF
Perencanaan Anggaran	1,182
Kompetensi Sumber Daya Manusia	6,163
Pelaksanaan Anggaran	4,919
Pengawasan	6,697

Sumber: Data Diolah,2020

Data di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Analisis Regresi

Tabel 2. Hasil analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	2,521	,952	,010
Perencanaan Anggaran	-,058	,036	,110
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,656	,094	,000
Pelaksanaan Anggaran	-,407	,097	,000
Pengawasan	,057	,108	,597
Komitmen Organisasi	,552	,086	,000

Sumber: Data Diolah, 2020

$$PA = 2,521 - 0,058 PA + 0,656 KSDM - 0,407 PA + 0,057 P + 0,552 KO + e$$

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa konstanta sebesar 2,521 mengartikan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, pengawasan maka besarnya nilai penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura adalah sebesar 2,521.

Koefisien regresi perencanaan anggaran ($\beta_1 X_1 = -0,058$) menunjukkan bahwa setiap variabel perencanaan anggaran tidak meningkat atau semakin buruk maka variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi $\beta_1 X_1$ atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura dibutuhkan variabel perencanaan anggaran sebesar - 0,058 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.

Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia ($\beta_2 X_2 = 0,656$) menunjukkan bahwa setiap variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat atau semakin baik maka variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi $\beta_2 X_2$ atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura dibutuhkan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,656 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.

Koefisien regresi pelaksanaan anggaran ($\beta_3 X_3 = -0,407$) menunjukkan bahwa setiap variabel pelaksanaan anggaran meningkat atau semakin baik maka variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura akan mempengaruhi peningkatan sebesar

nilai koefisien regresi β_3X_3 atau dengan kata lain setiap peningkatan penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura dibutuhkan variabel pelaksanaan anggaran sebesar - 0,407 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.

Koefisien regresi pengawasan ($\beta_4X_4 = 0,057$) menunjukkan bahwa setiap variabel pengawasan tidak meningkat atau semakin buruk maka variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi β_4X_4 atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura dibutuhkan variabel pengawasan sebesar 0,057 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.

Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,940 ^a	,885	,878	1,243

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 3, di atas menunjukkan bahwa variabel yang diteliti dalam penelitian ini layak, karena berkontribusi kurang lebih 87,8% sementara hampir 12,2% lainnya itu di luar dari pada penelitian ini.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,197	,589		17,324	,000
PA_KO	-,002	,002	-,068	-,903	,369
KSDM_KO	,031	,005	1,158	6,220	,000
PLA_KO	-,016	,004	-,495	-3,611	,001
PWA_KO	,008	,006	,273	1,532	,129

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 4, di atas maka dapat dibuat hasil perumusan sebagai berikut:

$$PA = 10,197 - 0,002PA * KO + 0,031KSDM * KO - 0,016PLA * KO + 0,008PWA * KO + e$$

Dari hasil analisis Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel moderasi yang merupakan interaksi antara variabel perencanaan anggaran dan variabel komitmen organisasi ternyata

signifikansinya ($P \text{ value} = 0,369$) $> 0,005$. Sehingga dapat di kemukakan bahwa komitmen organisasi bukan variabel moderasi. interaksi antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan variabel komitmen organisasi ternyata signifikansinya ($P \text{ value} = 0,000$) $< 0,005$. Sehingga dapat di kemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel moderasi. interaksi antara variabel pelaksanaan anggaran dan variabel komitmen organisasi ternyata signifikansinya ($P \text{ value} = 0,001$) $< 0,005$. Sehingga dapat di kemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel moderasi. interaksi antara variabel pengawasan dan variabel komitmen organisasi ternyata signifikansinya ($P \text{ value} = 0,129$) $> 0,005$. Sehingga dapat di kemukakan bahwa komitmen organisasi bukan variabel moderasi.

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,917 ^a	,841	,833	1,451

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 5, di atas menunjukkan bahwa variabel yang diteliti dalam penelitian ini layak, karena berkontribusi kurang lebih 83,3% sementara hampir 16,7% lainnya itu di luar dari pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika perencanaan anggaran buruk, maka keburukan tersebut diikuti oleh penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan

Pernyataan diatas dapat di dukung oleh penelitian Pancawati (2016). Hasil penelitian menunjukn bahwa Perencanaan dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran

Pengaruh kompetensi Sumber daya Manusia terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Fuadi,(2013) dan Putri, (2017). Hasil menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerpan anggaran. Namun hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan penelitian Pancawati (2015). Hasilnya menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika pelaksanaan anggaran baik, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Pelaksanaan yang tepat sesuai waktu dan jadwalnya akan membuat anggaran terserap dengan maksimal. Selanjutnya dalam pelaksanaan atas pengeluaran PPTK akan mengajukan dokumen pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang menjadi dasar penerbitan SPM. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Purba, (2017). Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika pengawasn tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan diatas didukung oleh peneliti Suparno (2012) hasil penelitian menunjukn bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sementara hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh Kurniawati, (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa komitmen orgnisasi tidak memperkuat perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika komitmen tidak memperkuat perencanaan anggaran, maka tidak mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para manajer bawahan berusaha keras mencapai tujuan organisasi Porter, (1992) Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Dewi, (2017) hasil menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh komitmen Organisasi Memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa komitmen orgnisasi mampu memperkuat kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika komitmen mampu memperkuat kompetensi sumber daya manusia, maka akan mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Sumber daya manusia paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Kompetensi merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Iqbal, (2018) hasil penelitian Mampu Memoderasi Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Komitmen organisasi Memoderasi pengaruh Pelaksanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika komitmen mampu memperkuat pelaksanaan anggaran, maka akan mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Hasil penelitian menunjukkan di dukung oleh penelitian Malahayati, (2015). Hasilnya menunjukkan komitmen organisasi mampu memperkuat pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Komitmen Organisasi Memoderasi pengaruh Pengawasan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat pengawasan terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika komitmen tidak memperkuat pengawasan, maka akan mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, Kurniawati, (2014) memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat pengawasan terhadap penyerapan anggaran.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut; Perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura, Pelaksanaan anggaran

tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura, Pengawasan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura sedangkan secara moderasi Komitmen organisasi tidak memoderasi perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura, Komitmen organisasi memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura, Komitmen organisasi memoderasi pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura dan Komitmen organisasi tidak memoderasi pengawasan terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.

Saran

Saran bagi Pemerintah kabupaten Jayapura, dalam meningkatkan Kinerja Aparat harus mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan dengan melibatkan peran serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten di bidangnya masing-masing dalam pencapaian tujuan yang transparan dan akuntabilitas. Pada Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2009. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi. Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah. (2017). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kualitas Kerja, Komunikasi Interpersonal Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMF BIF Yogyakarta. *Journal Of Accounting*.
- Chandrarin. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Bandung: Salemba Empat.
- Dewi, N. L. P. L. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jom. FEKON*, 30.
- Feriyanto. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta: manadetra.
- Fuadi. (2013). Pengaruh Pengawasan Aktif Dan Pengawasan Detektif Terhadap efektivitas Pengendalian Anggaran. *Journal Of Accounting*.

- Ghozali, I. (2018). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS Ver 5.0*, (Badan Pene). Semarang: Grafindo Persada.
- Harsono. (2011). *Sistem Administrasi Kepegawaian*. Bandung: fokus media.
- Hartono. (2008). *Paikem Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*. Pekanbaru.
- Iqbal, M. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*.
- Kurniawati, maria M. H. (2014). Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Of Accounting*.
- Malahayati, C. (2015). *Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemkot Banda Aceh*.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. jogjakarta: ANDI.
- Meyer. (1991). The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance, And Normative Commitment To The Organization. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Musa, (2010). Desain Penelitian. In : Sastroasmoro, S., Ismael, S., ed. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi Ke-3*. Jakarta: Sagung Seto, 92-111.
- Noch, M. Y., & Rasyid, A. (2015). *Akuntansi Sektor publik*. bandung: Selemba empat.
- Pancawati. (2015). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Journal Of Accounting*, 10.
- Porter, T. (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Purba, N. B. K. (2017). *Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating*.
- Putri, (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16.). Salemba Empat.
- Sekaran, & Bougie, R. (2017). *Metedologi Penelitian Untuk Bisnis* (6 Buku 1). Jakarta:

Salemba Empat.

Singarimbun, M. dan S. E. (2006). *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES.

Siswanto, B. (2011). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.*

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Mixed Methods)*. (Alfabeta.). Bandung.

Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, *Transparansi*, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Tesis*. Universitas Negeri Medan.